



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PUPUK INDONESIA GROUP
UNIT KERJA : PT PUPUK INDONESIA (PERSERO)

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SATRIYO NUGROHO**
2. Jabatan : **SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT PENGEMBANGAN BISNIS**
3. NHK : **187227**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 10.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 103 m²/70 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m²/70 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Bangunan Seluas 36 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 179 m²/200 m² di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
6. Bangunan Seluas 74 m² di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 834.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 159.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 675.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA**Rp. 874.250.000****D. SURAT BERHARGA****Rp. 91.419.701****E. KAS DAN SETARA KAS****Rp. 3.413.329.005****F. HARTA LAINNYA****Rp. 680.000.000****Sub Total****Rp. 16.392.998.706**



III. HUTANG

Rp. 101.620.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 16.291.378.706

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.